

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN PROPOSISI.

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris “*empowerment*” yang secara harfiah dapat diartikan sebagai “pemberkuasaan”, dalam arti pemberian atau peningkatan “kekuasaan” (*power*) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung (*disadvantaged*). Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” yang berarti memiliki atau mempunyai daya. Daya berarti kekuatan, berdaya berarti memiliki kekuatan. Namun pada perkembangannya dari berbagai referensi dan bidang menunjukkan keragaman pengertian atas makna *empowerment* tersebut. *Empowerment* pada umumnya diterjemahkan kedalam istilah “pemberdayaan”. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan.

Adapun pengertian pemberdayaan menurut Suharto dalam bukunya *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, sebagai berikut:

“Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah. Sebagai tujuan, pemberdayaan adalah menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial”. (Suharto, 2010:59-60).

Pengertian di atas bahwa pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga lebih kuat ikut serta dalam suatu kegiatan pemberdayaan. Kemampuan masyarakat bojongsong dalam mengelola sampah dengan memanfaatkannya menjadi sesuatu hal yang berguna perlu dukungan pihak pemerintah.

Pengertian pemberdayaan menurut Priyono yang menganalisa pengertian pemberdayaan (*empowerment*), yaitu:

“Pemberdayaan merupakan sebagai konsep pembangunan memiliki makna pengembangan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan disegala bidang dan sektor kehidupan. Disamping itu pemberdayaan juga memiliki makna melindungi dan membela dengan cara berpihak kepada yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah”. (Priyono, 1996:97)

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat dipahami bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu cara dengan masyarakat, organisasi dan komunitas yang diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya. Hasil dari penguasaan kehidupan sendiri dapat menghasilkan masyarakat yang mandiri sehingga menjadi masyarakat yang lebih kuat dari kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi disekitarnya. Pengertian lain pemberdayaan menurut Pranaka dan Moeljarto, yaitu:“

Pemberdayaan adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi”. (Pranaka, 1996:56).

Konsep pemberdayaan sebagaimana didefinisikan oleh Pranaka dan Moeljarto merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk membuat seseorang atau sekelompok orang menjadi lebih baik. Sekelompok orang yang dimaksud

merupakan masyarakat yang mempunyai kemauan untuk lebih beradab dan adil dalam menjalankan kehidupannya.

Adapun pengertian pemberdayaan menurut Kiesberg yaitu sebagai berikut:

“Empowerment involves individuals gaining control of their lives and fulfilling their need in part, as a result of developing competencies, skills and abilities necessary to effectively participate in their social and political worlds.” (Kiesberg, 1992:19).

Pengertian pemberdayaan menurut pendapat di atas merupakan kemampuan individu untuk mengendalikan dirinya agar lebih berkompetensi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemberdayaan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan untuk berpartisipasi di dunia sosial dan politik secara efektif.

Definisi pemberdayaan dikemukakan oleh Wasistiono mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan sebagai berikut:

“Pemberdayaan adalah membebaskan seseorang dari kendali yang kaku, dan memberi orang kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya dan tindakan-tindakannya.” (Wasistiono, 1998:46).

Berdasarkan pendapat di atas, pemberdayaan merupakan perubahan kemampuan seseorang ke arah yang lebih baik. Pencapaian kebebasan dengan cara mengendalikan yang tadinya kaku menjadi produktif yakni seseorang yang asalnya tidak mempunyai kemampuan menjadi lebih berkompeten dengan mempertanggung jawabkan semua tindakannya.

Selanjutnya menurut Mustafa mendefinisikan pemberdayaan sebagai berikut: *“Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk menambah, meningkatkan dan memperbaharui pengetahuan, sikap, dan keterampilan penduduk agar meningkat taraf kehidupannya”*. (Mustafa, 2008:74).

Pengertian pemberdayaan dari definisi tersebut merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan cara meningkatkan potensi yang ada. Seperti pengetahuan seseorang, sikap dalam menjalankan kehidupannya dan keterampilan menghasilkan produk dan jasa yang berguna untuk meningkatkan taraf kehidupannya.

Beragam definisi pemberdayaan tersebut menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Proses pemberdayaan cenderung dikaitkan sebagai unsur pendorong (*driving's force*) sosial-ekonomi, politik. Pemberdayaan adalah suatu upaya dan proses bagaimana agar berfungsi sebagai "*power*" (*driving's force*) dalam pencapaian tujuan yaitu pengembangan diri (*self-development*). Secara konseptual dikemukakan oleh Saraswati, pemberdayaan harus mencakup enam hal sebagai berikut:

- a) *Learning by doing*, artinya, pemberdayaan adalah sebagai proses belajar dan ada suatu tindakan-tindakan konkrit yang terus-menerus, yang dampaknya dapat terlihat.
 - b) *Problem solving*, pemberdayaan harus memberikan arti terjadinya pemecahan masalah yang dirasakan krusial dengan cara an waktu yang tepat.
 - c) *Self-evaluation*, pemberdayaan harus mampu mendorong seseorang atau kelompok tersebut untuk melakukan evaluasi secara mandiri.
 - d) *Self-development and coordination*, artinya mendorong agar mampu melakukan pengembangan diri dan melakukan hubungan koordinasi dengan pihak lain secara lebih luas.
 - e) *Self-selection*, suatu kumpulan yang tumbuh sebagai upaya pemilihan dan penilaian secara mandiri dalam menetapkan langkah-langkah ke depan.
 - f) *Self-decisim*, dalam memilih tindakan yang tepat hendaknya memiliki kepercayaan diri (*self-confidence*) dalam memutuskan sesuatu secara mandiri (*self-dicism*)
- (Saraswati, 1997: 79-80).

Keenam unsur tersebut merupakan pembiasaan untuk berdaya, sebagai penguat dan pengait pemberdayaan jika dilakukan secara berkesinambungan, maka pengaruh yang ditimbulkan semakin lama semakin kuat. Apabila telah kuat diharapkan dapat terjadi *feedback* yang baik, sehingga upaya pemberdayaan yang telah direncanakan sebelumnya dapat berjalan dengan baik dan dapat membangun ekonomi masyarakat serta mengembangkan diri sehingga tercapai tujuan yang lebih besar.

Selanjutnya Teori "ACTORS" tentang pemberdayaan yang dikemukakan oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay, yang lebih memandang kepada masyarakat sebagai subyek yang dapat melakukan perubahan dengan cara membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberi orang tersebut kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-ide, keputusan-keputusannya, dan tindakan-tindakannya. Pemberdayaan yang dimaksudkan oleh Cook dan Macaulay lebih mengarah pada pendelegasian secara sosial dan etika/moral, antara lain: (a)

mendorong adanya ketabahan; (b) mendelegasikan wewenang sosial; (c) mengatur kinerja; (d) mengembangkan organisasi (baik lokal maupun eksteren); (e) menawarkan kerjasama; (f) berkomunikasi secara efisien; (g) mendorong adanya inovasi; dan (h) menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Kerangka kerja pemberdayaan dapat dilihat dari akronim "ACTORS" antara lain terdiri dari:

A= *authority* (Wewenang) dengan memberikan kepercayaan

C= *confidence and competence* (Rasa percaya diri dan kemampuan)

T= *trust* (Keyakinan)

O= *opportunities* (Kesempatan)

R= *responsibilities* (Tanggung jawab)

S = *support* (Dukungan)

Selanjutnya Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses. Pengertian pemberdayaan menurut Suharto dalam bukunya yang berjudul *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1. Pengembangan potensi
 2. Kemampuan
 3. Perlindungan
 4. Dukungan
 5. Pemeliharaan
- (Suharto, 2010: 67-68)

Maka Pemberdayaan Masyarakat pada penelitian ini dilihat melalui indikator keberhasilan menurut Suharto (2010) Sebagai berikut :

1. Pengembangan potensi

Pengembangan Potensi adalah diartikan untuk menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang

pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat kultural yang menghambat. Pengembangan potensi terdiri dari :

- a) Pengetahuan
- b) Motivasi dan
- c) Kultural.

Fungsi yang berkaitan dengan pemberian motivasi dan kesempatan bagi masyarakat yang berkaitan dengan fungsi ini antara lain model (contoh), melakukan mediasi dan negosiasi, membangun konsesus bersama, serta melakukan manajemen sumber. Program penanganan masalah sosial pada umumnya diberikan anggota masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber, baik karena sumber tersebut tidak ada di sekitar lingkungannya, maupun karena sumber-sumber tersebut sulit dijangkau karena alasan dan faktor ekonomi birokrasi.

2. Kemampuan

Kemampuan merupakan memperkuat kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat dalam mengelola sampah . Kemampuan terdiri dari:

- a) Pendidikan
- b) Pelatihan

Fungsi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihann guna memperkuat kapasitas masyarakat. Kemampuan berperan aktif sebagai

agen yang memberi masukan positif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan fungsi kemampuan. Semua pertukaran informasi pada dasarnya merupakan bentuk pendidikan. Fungsi pendidikan lebih menunjuk pada sebuah proses kegiatan daripada sebuah hasil kegiatan. Pelatihan memiliki potensi dan sumber yang dapat digunakan dalam proses belajar. Pada akhirnya kemampuan yang didukung dengan pendidikan dan pelatihan yang tepat dapat merujuk pada proses pemberdayaan yang baik pula.

3. Perlindungan

Perlindungan merupakan kegiatan melindungi masyarakat terutama kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil. Memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Perlindungan merupakan juga mempunyai fungsi sebagai konsultan, yakni sebagai pemecahan masalah. Konsultasi pemecahan masalah tidak hanya berupa pemberian dan penerimaan saran-saran, melainkan merupakan proses yang ditujukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pilihan-

pilihan dan mengidentifikasi prosedur-prosedur bagi tindakan-tindakan yang diperlukan.

4. Dukungan

Dukungan merupakan memberikan bimbingan dan penyediaan agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha, Dukungan terdiri dari :

- a) Keterampilan dasar,
- b) Komunikasi dan

Dukungan mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis yang dapat mendukung terjadinya perubahan positif pada masyarakat. Dukungan dituntut tidak hanya mampu menjadi fasilitator yang ada, melainkan mampu menciptakan keselarasan dan keseimbangan dalam melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai keterampilan dasar, komunikasi, dan dalam hal mengatur sumber dana.

5. Pemeliharaan

Pemeliharaan merupakan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. Pemeliharaan terdiri dari

- a) Perhatian dan

b) Pembinaan.

Pemeliharaan berfungsi untuk memelihara keadaan yang kondusif agar tetap terjadi suatu keadaan yang seimbang antara berbagai kepentingan kelompok dalam masyarakat.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan dapat dilakukan melalui berbagai bentuk seperti *authority* kelompok/masyarakat diberikan kewenangan untuk merubah pendirian atau semangat (etos kerja) , *confidence* menimbulkan rasa percaya diri menuju suatu perubahan yang lebih baik, *trust* yakin kepada masyarakat akan suatu perubahan , *opportunities* memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang ada dalam diri masyarakat itu sendiri , *responsibilities* dengan penuh tanggung jawab untuk berubah menjadi lebih baik , *support* perlu adanya dukungan dari berbagai pihak untuk menjadikan lebih baik. dan Pemberdayaan dapat terjadi dalam tahap Pengembangan Potensi, Kemampuan, Perlindungan, Dukungan , Pemeliharaan dalam membangun masyarakat yang lebih baik .

2.1.2 Pengertian Masyarakat

Masyarakat (sebagai terjemahan istilah *society*) merupakan sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata "masyarakat" sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, musyarak. Berdasarkan pengetahuan tersebut, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah

komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Istilah masyarakat berasal dari akar kata Arab “syaraka” yang berarti ikut serta (berpartisipasi). Dalam bahasa Inggris dipakai istilah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti kawan, berikut definisi masyarakat menurut Soeharto, yaitu :

“Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, dan kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama”. (Suharto, 2010:47).

Berdasarkan definisi di atas, dengan adanya persamaan yang dimiliki maka akan membentuk suatu kelompok yang memiliki prinsip yang sejalan. Dari persamaan yang ada, maka akan membentuk sebuah kekuatan yang dibangun satu sama lain. Sejalan dengan Selo Sumardjan dalam bukunya yang berjudul *Setangkai Bunga Soisologi*, yaitu: “Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan” (Sumardjan, 1964:115)

Persamaan yang dimiliki pada setiap individunya dapat menghasilkan sebuah kebudayaan yang menjadi identitas pada suatu sekelompok masyarakat. Kebudayaan mencakup aspek pengetahuan, kesenian, adat istiadat, hukum dan lain-lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas, masyarakat merupakan sekelompok orang maupun penduduk yang hidup bersama dalam suatu tempat dan dirasa dapat memenuhi kepentingan hidup bersama serta berkedudukan sebagai pihak yang menerima manfaat pelayanan publik.

Koentjaraningrat menjabarkan definisi sebagai berikut :

“Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat *continue* dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama”. (Koentjaraningrat, 1994:329).

Berdasarkan pendapat tersebut, kesamaan identitas tersebut yang kemudian menjadikan sekelompok manusia atau masyarakat menjadi sebuah kekuatan yang diabdikan kepada masyarakat lainnya untuk keperluan bersama. Sistem adat dan istiadat tersebut dilaksanakan secara turun temurun dan dengan keterikatan satu sama lain agar kebudayaan yang telah ada dapat tetap dijaga.

Pengertian Masyarakat menurut Alimandan dalam buku Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang, menjelaskan sebagai berikut :

“Pengertian masyarakat dengan istilah *Community*, dimana istilah tersebut menunjuk pada warga sebuah desa, kota, suku atau bangsa. Apabila anggota-anggota suatu kelompok, baik kelompok itu besar maupun kecil, hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama, maka kelompok itu disebut masyarakat” (Alimandan, 1985:3).

Berdasarkan pendapat di atas, masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan mereka. Pernyataan tersebut sejalan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menjelaskan:

“Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga Negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung” (UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik).

Berdasarkan pengertian di atas, masyarakat merupakan sekelompok orang maupun penduduk yang hidup bersama dalam suatu tempat dan dirasa dapat

memenuhi kepentingan hidup bersama serta berkedudukan sebagai pihak yang menerima manfaat pelayanan publik.

Menurut Soerjono Soekanto alam masyarakat setidaknya memuat unsur sebagai berikut ini :

1. Beranggotakan minimal dua orang.
2. Anggotanya sadar sebagai satu kesatuan.
3. Berhubungan dalam waktu yang cukup lama yang menghasilkan manusia baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan-aturan hubungan antar anggota masyarakat.
4. Menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat.
(Soekanto, 2006:71).

Berdasarkan uraian di atas faktor kesatuan dan persamaan dalam masyarakat menjadi faktor utama yang menentukan berjalannya sebuah masyarakat yang kemudian menimbulkan suatu kebudayaan yang menjadi identitas kuat di dalamnya. Hubungan dalam waktu yang cukup lama dapat membuat suatu komunikasi yang sejalan karena adanya kebiasaan-kebiasaan sehingga menghasilkan sebuah peraturan-peraturan kesepakatan antar anggota masyarakat untuk menjadi sebuah masyarakat yang baik.

Adapun beberapa fungsi masyarakat menurut Suharto adalah:

1. Penyedia dan pendistribusi barang-barang dan jasa
2. Lokasi kegiatan bisnis dan pekerjaan
3. Keamanan publik
4. Sosialisasi
5. Wadah dukungan bersama atau gotong royong
6. Kontrol sosial
7. Organisasi dan partisipasi politik
(Suharto, 2010:47).

Definisi mengenai fungsi masyarakat ini merupakan hasil dari adanya persamaan yang ada sehingga membuat suatu fungsi bagaimana masyarakat itu berguna bagi satu sama lain. Masyarakat berfungsi sebagai wadah dukungan

bersama untuk mencapai tujuan yang akan dicapai bersama. Tujuan dasar pemberdayaan adalah keadilan sosial dengan memberikan ketentraman kepada masyarakat yang lebih besar serta persamaan politik dan sosial melalui upaya saling membantu dan belajar melalui pengembangan langkah-langkah kecil guna tercapainya tujuan yang lebih besar.

2.1.3 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya terkait pemberdayaan dan masyarakat merupakan sebuah proses atau usaha dalam memberikan daya pada sekelompok masyarakat tertentu. Proses pemberdayaan sebagai proses selalu harus melibatkan masyarakat dalam setiap prosesnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan juga evaluasi (Hajaroh & Mulyono, 2014: 30).

Pemberdayaan juga lebih jelasnya dimaknai sebagai setiap usaha pendidikan dengan tujuan membangkitkan kesadaran dan keinginan untuk memiliki pengetahuan (*knowledges*), keterampilan (*skills*) dan kemampuan (*abilities*) yang pada akhirnya akan bisa digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut (Subekti, 2018: 150).

Sedangkan mengenai unsur-unsur pemberdayaan masyarakat, menurut Suhendra unsur-unsur tersebut yaitu :

1. Kemauan politik yang mendukung
2. Suasana kondusif untuk mengembangkan potensi secara menyeluruh
3. Motivasi
4. Potensi masyarakat
5. Peluang yang tersedia
6. Kerelaan mengalihkan wewenang

- 7. Perlindungan
 - 8. Awareness (kesadaran)
- (Suhendra, 2006: 87)

Hal diatas menunjukkan bahwa unsur pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu bentuk rencana kegiatan yang realistis. Yang ditunjukkan dengan adanya sasaran, kebijaksanaan maupun prosedur pelaksanaan yang jelas. Berdasarkan pada unsur pemberdayaan masyarakat yang baik tersebut, maka hendaknya dalam perumusan program pemberdayaan memperhatikan hal-hal tersebut di atas. Supaya program pemberdayaan yang dilakukan bisa mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Pemahaman mengenai konsep pemberdayaan tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mengenai siklus pemberdayaan itu sendiri, karena pada hakikatnya pemberdayaan adalah sebuah usaha berkesinambungan untuk menempatkan masyarakat menjadi lebih proaktif dalam menentukan arah kemajuan dalam komunitasnya sendiri. Artinya program pemberdayaan tidak bisa hanya dilakukan dalam satu siklus saja dan berhenti pada suatu tahapan tertentu, akan tetapi harus terus berkesinambungan dan kualitasnya terus meningkat dari satu tahapan ke tahapan berikutnya. Beberapa prinsip mengenai pemberdayaan masyarakat juga dikemukakan oleh Suharto dalam Analisa Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, sebagai berikut:

- A. Membangun relasi pertolongan yang:
 - (1) merefleksikan respon empati;
 - (2) menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri (self-determination);
 - (3) menghargai perbedaan dan keunikan individu;
 - (4) menekankan kerjasama klien (*client partnership*)
- B. Membangun komunikasi yang:
 - (1) menghormati martabat dan harga diri klien;

- (2) mempertimbangkan keragaman individu;
 - (3) berfokus pada klien;
 - (4) menjaga kerahasiaan klien.
- C. Terlibat dalam pemecahan masalah yang:
- (1) memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah;
 - (2) menghargai hak-hak klien;
 - (3) merangkai tantangan sebagai kesempatan belajar;
 - (4) melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi.
- D. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui:
- (1) ketaatan terhadap kode etik profesi;
 - (2) keterlibatan dalam pengembangan profesional; riset dan perumusan kebijakan;
 - (3) penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu publik;
 - (4) penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidak setaraan kesempatan. (Suharto, 2005:68)

Uraian di atas menjelaskan bahwa bagaimana masyarakat menempatkan dirinya sebagai aktor atau subyek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan yang ada disekitarnya. Tingkat kepekaan terhadap satu sama lain dalam menghadapi sebuah masalah sangat dibutuhkan dalam sebuah aktivitas pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah juga dibutuhkan kepekaan satu sama lain. Seperti masalah dalam membuang sampah sembarangan yang sudah menjadi budaya di Indonesia, maka dari masalah tersebut jika secara luas memiliki tingkat kesadaran dan kepekaan dengan mengganti pola pikir dengan bagaimana sampah yang pada dasarnya tidak memiliki nilai kemudian dapat dirubah menjadi suatu barang yang dapat berguna. kesadaran dan kepekaan yang demikian yang harus ditanamkan dalam prinsip pemberdayaan masyarakat.

Namun demikian, untuk memberdayakan, masyarakat memerlukan rangkaian proses panjang, agar mereka menjadi lebih berdaya. Berdasarkan uraian

pengertian mengenai pemberdayaan dan masyarakat, maka menurut Sunyoto Usman mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

“Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self-reliance* atau kemandirian” (Sunyoto, 2008:30).

Berdasarkan uraian tersebut dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut. Serta diperlihatkan strategi pemanfaatan berbagai *resources* yang dimiliki dan dikuasai. Pada proses tersebut, masyarakat dibantu bagaimana merancang sebuah kegiatan sesuai kemampuan yang dimiliki, bagaimana mengimplementasikan rancangan tersebut, serta bagaimana membangun strategi memperoleh sumber-sumber eksternal yang dibutuhkan sehingga memperoleh hasil yang optimal.

2.1.4 Pengertian Pemerintah

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memperoleh pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah. Tujuan utama dibentuk pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat sehingga bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Dan pemerintah modern pada hakekatnya adalah pelayanan masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap masyarakat mengembangkan kemampuan dan

kreatifitasnya demi kemajuan bersama. Adapun definisi Pemerintah menurut Miriam Budiarjo yaitu

“Pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara, rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara dan memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut. (Miriam Budiarjo, 2003:21)”

Berdasarkan penjelasan diatas Pemerintah berperan dalam mewujudkan tujuan-tujuan tersebut melalui kebijakan, program, dan tindakan yang diarahkan untuk kepentingan negara dan rakyat. menekankan pentingnya kedaulatan negara, konsep dasar negara, dan tujuan pemerintahan dalam memahami pemerintah sebagai suatu entitas yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengelolaan urusan negara dan masyarakat. Menurut Taliziduhu Ndraha, terdapat dua jenis fungsi pemerintah yang dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Fungsi primer, yaitu fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya yang diperintah, semakin meningkat fungsi primer pemerintah. Pemerintah berfungsi primer sebagai provider jasa publik yang tidak diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan sipil termasuk layanan birokrasi.
2. Fungsi sekunder yaitu fungsi yang berhubungan negatif dengan tingkat keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya yang diperintah, semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah. Pemerintah berfungsi sekunder sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana. (Ndraha, 2000, 78)

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pemerintah memiliki peran ganda dalam menyediakan jasa publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Fungsi primer pemerintah terkait dengan kewajiban pemerintah dalam memberikan layanan publik yang penting dan tidak dapat diprivatisasi. Sementara itu, fungsi sekunder pemerintah berfokus pada kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri

oleh pemerintah, sehingga diperlukan kerjasama dengan sektor lain atau pihak swasta.

2.1.5 Pengertian Pemerintahan

Pemerintahan adalah sebuah cabang ilmu dari kajian ilmu politik. Sampai saat ini masih terdapat beberapa perdebatan mengenai ilmu pemerintahan dan ilmu politik. Kajian utama kepemimpinan pemerintahan adalah kebijakan pemerintahan (*publik policy*). Pada intinya membuat suatu kebijakan pemerintahan merupakan suatu studi tentang proses kebijakan itu sendiri karena kebijakan publik merupakan decision making (memilih dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan masalah). Pemerintahan merupakan suatu ilmu dan seni, dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan karena pemerintahan sudah memenuhi syarat syarat ilmu pengetahuan seperti dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek baik material maupun formal, bersifat universal dan sistematis serta spesifik (khas). Pemerintahan diungkapkan menurut Surya Ningrat sebagai berikut:

"Pemerintahan adalah sekelompok individu yang memiliki wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan pemerintah adalah perbuatan atau urusan atau memerintah" (Surya Ningrat,1992:11)

Berdasarkan Pengertian Diatas bahwa pemerintahan adalah entitas yang bertanggung jawab untuk mengelola urusan publik dan menjalankan kekuasaan negara. Kelompok individu yang terlibat dalam pemerintahan biasanya termasuk pejabat pemerintah, baik terpilih maupun ditunjuk, yang memiliki tanggung jawab untuk membuat kebijakan, mengatur dan mengelola sumber daya, serta menjalankan tugas-tugas administratif dan eksekutif. dan Pemerintahan memiliki

peran yang penting dalam memastikan stabilitas dan keberlanjutan pemerintahan serta menyediakan landasan hukum dan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, seperti transparansi, partisipasi publik, akuntabilitas, dan keadilan, sering kali menjadi pijakan dalam pembangunan sistem pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pendapat mengenai definisi pemerintahan diungkapkan juga oleh Muhadam Labolo sebagai berikut:

“Pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati atau diinginkan bersama. Pemerintahan dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangan”. (Labolo, 2007:24)

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pemerintahan tidak hanya terbatas pada pelaksanaan kekuasaan politik semata, tetapi lebih merupakan proses yang melibatkan kerjasama dan pengelolaan kehidupan bersama. Pemerintahan bertujuan untuk mencapai kesepakatan atau harapan bersama masyarakat dalam mengatur dan mengelola urusan publik dan pentingnya pandangan terhadap pemerintahan, dengan mempertimbangkan aspek dinamika, struktur fungsional, serta tugas dan kewenangan. Pemerintahan yang baik dan benar diharapkan dapat mencapai tujuan bersama masyarakat melalui manajemen yang efektif dan menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi kehidupan bersama. Sedarmayanti berpendapat bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu menghormati kedaulatan rakyat yang memiliki tugas pokok yang meliputi beberapa hal:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
 2. Memajukan kesejahteraan umum
 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
 4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- (Sedarmayanti, 2004:9)

Penjelasan Diatas bahwa pemerintahan yang baik adalah yang memenuhi tugas-tugas pokok tersebut dengan menghormati kedaulatan rakyat. Hal ini menekankan pentingnya pemerintahan yang berfokus pada pelayanan kepada masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan sosial.

2.1.6 Pengertian Sampah

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang dapat merugikan banyak pihak baik masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Adapun pengertian sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, definisi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Undang-Undang ini menyebutkan tiga jenis sampah yang harus dikelola: sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik .

Berdasarkan pengertian tersebut sampah merupakan sisa dari bentuk limbah atau barang buangan yang tidak terpakai lagi oleh manusia yang berbentuk padat. Segala macam organisme yang ada di alam ini selalu menghasilkan limbah atau bahan buangan atau yang dapat juga kita sebut sampah. Semakin majunya peradaban, menambah jenis limbah atau sampah dalam kehidupan kita. Sampah itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Sampah Organik

Jenis sampah daratan yang dapat didegradasi atau dipecah oleh mikroorganisme, menjadi bahan yang mudah menyatu kembali dengan alam tanpa menimbulkan pencemaran pada lingkungan.

2. Sampah Anorganik

Jenis sampah daratan yang tidak dapat didegradasi atau dipecah oleh mikroorganisme, dan tidak dapat menjadi bahan yang mudah menyatu kembali dengan alam. (Wardhana, 2004:99-100).

Pengertian di atas tersebut sampah terbagi menjadi dua kategori pertama sampah organik yaitu sampah yang mudah menyatu kembali dengan alam dengan sendirinya dapat melebur tanpa menimbulkan pencemaran. Kedua sampah anorganik merupakan sampah yang tidak bisa melebur dengan alam, biasanya sampah jenis tersebut dapat digunakan kembali menjadi barang yang berguna.

Penumpukan sampah yang tidak terkendali dapat menimbulkan penyakit dan pencemaran lingkungan. Pengendalian sampah sangat diperlukan untuk mengurangi dampak buruk tersebut. Salah satu usaha yang dilakukan yaitu dengan cara pengelolaan sampah yang baik, oleh karena itu peran aktif pemerintah dan masyarakat menjadi tuntutan yang harus dilakukan bersama.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka disimpulkan menurut Kuncoro Sejati dalam bukunya yang berjudul *Pengolahan Sampah Terpadu*, sebagai berikut: “Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir” (Kuncoro,2009:24). Pengelolaan sampah yang baik dilakukan sejak ditimbulkan sampah sampai akhir pembuangan. Secara garis besar, kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah pengumpulan sampah, transfer dan transpor, pengolahan, dan pembuangan akhir.

2.1.7 Pengertian Bank Sampah

Perlindungan terhadap alam dan lingkungan merupakan tanggung jawab manusia, baik manusia secara individu, golongan, maupun organisasi. Proses perlindungan lingkungan dan alam sejatinya sudah banyak diatur baik secara tertulis ataupun tidak tertulis dalam norma nilai masyarakat.

Pola yang dibangun dalam usaha perlindungan lingkungan dan alam seringkali kurang tepat ataupun tidak berjalan efektif dalam masyarakat. Inovasi dalam rangka perlindungan seperti ini sangat dibutuhkan untuk secara tepat guna melindungi tidak hanya lingkungan tapi lebih jauh juga kepada individu manusia.

Bank sampah menjadi salah satu inovasi yang banyak digunakan di berbagai wilayah. Pola pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor yang dapat berperan aktif dalam mengurangi volume sampah merupakan keputusan yang tepat dalam mengantisipasi peningkatan jumlah volume sampah perkotaan yang terus meningkat akibat peningkatan jumlah penduduk (Nugraha, dkk: 2018).

Sistem bank sampah (*wasted bank*) dilihat sebagai inovasi yang tepat dalam mewujudkan pola perlindungan lingkungan yang baik dan mulai digunakan pada berbagai daerah di Indonesia.

Penanganan pada pengolahan sumber sampah memiliki konsep tersendiri, dimana perilaku penanganan disesuaikan pada jenis dan karakteristik sampah. Menurut Cunningham (2004) tahap pengelolaan sampah modern terdiri dari 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) sebelum akhirnya dimusnahkan atau dihancurkan. Adapun pengertian 3R sebagai berikut:

1. *Reduce* (mengurangi)
 2. *Reuse* (menggunakan kembali)
 3. *Recycle* (mendaur ulang)
- (Cunningham, 2004:57)

Berdasarkan pengertian di atas Penanganan sampah 3R sangat penting untuk dilaksanakan dalam rangka pengelolaan sampah padat perkotaan yang efisien dan efektif, sehingga diharapkan dapat mengurangi biaya pengelolaan sampah.

Selanjutnya penjelasan mengenai pengertian 3R dikemukakan oleh Soedrajat, sebagai berikut:

1. *Reduce* berarti mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Prinsip *Reduce* dilakukan dengan cara sebisa mungkin melakukan minimalisasi barang atau material yang digunakan.
2. *Reuse* berarti menggunakan kembali. Prinsip *reuse* dilakukan dengan cara sebisa mungkin memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali menghindari pemakaian barang-barang yang hanya sekali pakai. Hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum menjadi sampah .
3. *Recycle* berarti mendaur ulang, Prinsip *recycle* dilakukan dengan cara sebisa mungkin, barang-barang yang sudah tidak berguna lagi, bisa didaur ulang. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri non-formal dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. (Soedrajat, 2008: 45)

Dari uraian diatas pengelolaan sampah dengan Program 3R merupakan cara yang efektif dalam pengelolaan sampah jika dilakukan dengan sungguh sungguh khususnya oleh masyarakat yang merupakan penghasil sampah paling produktif. Pada pelaksanaan dilapangan, pengelolaan sampah juga mengalami hambatan. Hambatan terbesar yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat dan kebiasaan masyarakat yang hanya membuang saja tanpa memilah terlebih dahulu.

2.1.8 Mekanisme Bank Sampah

Pelaksanaan program bank sampah memiliki mekanisme yang sedikit berbeda dengan bank konvensional, meskipun prosedural secara umum sama. (Utami 2013: 30-31) menyebutkan setidaknya mekanisme sistem bank sampah terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

a). **Pemilahan Sampah**

Pada tahap ini, nasabah atau masyarakat peserta bank sampah harus memilah terlebih dahulu sebelum disetorkan ke bank sampah. Pemilahan sampah tergantung pada kesepakatan saat pembentukan bank sampah. Misalnya berdasarkan kategori sampah antara organik dan an-organik Biasanya sampah an-organik kemudian dipisahkan lagi berdasarkan jenis bahannya berupa plastik, kertas, kaca dan jenis lainnya.

Pengelompokan sampah seperti tersebut akan memudahkan pada proses selanjutnya yaitu penyaluran sampah. Apakah akan disampaikan ke tempat pembuatan kompos, pabrik plastik atau industri rumah tangga sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan. Dengan sistem bank sampah, masyarakat secara tidak langsung juga ikut serta membantu mengurangi tumpukan sampah di tempat-tempat pembuangan akhir. Karena, sebagian besar sampah yang sebelumnya langsung ke pembuangan akhir telah dikurangi dengan pemilahan yang dilakukan masyarakat dan dikirimkan ke bank sampah akan dimanfaatkan kembali. Sehingga sampah yang masuk ke pembuangan akhir benar-benar tinggal sampah yang memang tidak memiliki nilai ekonomis dan berbahaya.

b). Penyetoran Sampah ke Bank

Mekanisme selanjutnya adalah proses penyetoran sampah ke Bank. Proses penyetoran ini dilakukan pada waktu yang telah ditentukan bersama atau dari pihak pengelola bank sampah. Misalnya, ditentukan waktunya 1 minggu 1 atau 2 kali penyetoran setiap hari sabtu dan minggu. Penjadwalan seperti ini dimaksudkan untuk menyamakan waktu nasabah menyetor dan pengangkutan ke pengepul. Hal ini dilakukan supaya sampah tidak tertimbun dan menumpuk di lokasi bank sampah.

c). Penimbangan

Setelah nasabah melakukan pemilahan sampah miliknya dan dibawa ke bank sampah pada waktu yang ditentukan untuk di setorkan, selanjutnya sebelum masuk ke bank sampah adalah melakukan penimbangan. Sampah yang sudah dibawa ke bank kemudian ditimbang. Berat sampah yang bisa disetorkan oleh nasabah ke bank sampah sudah ditentukan pada kesepakatan sebelumnya. Misalnya harus minimal yang disetor itu 1 kilogram.

e). Pencatatan

Mekanisme selanjutnya yaitu pencatatan yang dilakukan oleh petugas bank sampah. Petugas akan mencatat jenis dan bobot sampah setelah penimbangan dilakukan. Hasil dari pengukuran tersebut lalu dikonversikan ke dalam nilai rupiah yang kemudian dicatat di buku tabungan nasabah. Pada sistem bank sampah, tabungan biasanya bisa diambil setiap dua atau tiga bulan sekali. Tabungan bank sampah bisa dimodifikasi menjadi beberapa jenis, yaitu tabungan hari raya,

tabungan pendidikan dan tabungan yang sifatnya sosial tergantung pada jenis tabungan program yang tersedia dari pengelola bank sampah.

f). Pengangkutan

Tahapan mekanisme selanjutnya adalah pengangkutan. Tahapan ini pihak pengelola bank sampah sudah harus bekerjasama dengan pengepul yang sudah ditunjuk dan disepakati bersama. Selanjutnya, setelah proses sampah yang sudah terkumpul, ditimbang dan dicatat akan bisa langsung diangkut ke tempat pengolahan sampah tersebut. Sehingga, tidak terjadi penumpukan sampah di lokasi bank sampah.

2.1.9 Manfaat Bank Sampah

Manfaat Bank Sampah Pemanfaatan merupakan turunan kata dari kata “manfaat”, yang mendapat imbuhan pe-dan-an yang berarti proses, cara, perbuatan memanfaatkan. Pemanfaatan adalah aktifitas menggunakan proses dan sumber-sumber belajar. Menurut Davis kemanfaatan adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan teknologi akan meningkatkan kinerjanya. Kemanfaatan (*perceived usefulness*) merupakan penentu yang kuat terhadap penerimaan pengguna suatu informasi, adopsi, dan perilaku para pengguna.

Setelah tujuan tersebut dilaksanakan dengan baik dan benar maka manfaat yang dirasakan dari adanya bank sampah ini, sebagaimana Mayang, Haryono, dan Kholisya mengatakan, manfaat adanya bank sampah tidak hanya dari sisi ekonomi bagi masyarakat, namun dapat membantu pemerintah menekan

terjadinya bencana banjir, akibat masyarakat membuang sampah sembarangan dan tidak memanfaatkan barang-barang bekas yang masih bisa digunakan.

Menurut Suwerda manfaat yang dapat diperoleh dari adanya 50organi pengelolaan sampah yaitu:

A). Kesehatan Lingkungan

1. Dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan terhindar dari sampah.
2. Dapat mengurangi kebiasaan membakar sampah yang dapat merusak kesehatan dan pencemaran udara.
3. Dapat mengurangi kebiasaan menimbun sampah (50rganic) yang dapat mencemari tanah.
4. Masyarakat dapat memahami pentingnya menjaga lingkungan.

B). Sosial Ekonomi Masyarakat

1. Dapat menambah penghasilan keluarga yang diperoleh dari tabungan sampah.
2. Dapat mengkratkan hubungan antar anggota masyarakat.
3. Dapat menekan biaya transportasi yang harus dikeluarkan pengepul untuk mengangkut sampah.

Adapun manfaat tambahan bank sampah sebagaimana dengan adanya kegiatan ini juga memberikan ilmu dan pengetahuan bagi masyarakat tentang bagaimana mengolah sampah dengan baik dan juga meningkatkan ekonomi para anggotanya dan masyarakat sekitar . di sisi lain program Bank Sampah mendatangkan manfaat positif terhadap lingkungan yakni membuat lingkungan

menjadi lebih bersih dan yang paling banyak dirasakan oleh masyarakat yaitu berkurangnya tumpukan sampah di lingkungan sekitar.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, Namun pada pelaksanaannya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah Bersinar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung masih mengalami beberapa masalah, diantaranya, masih kurangnya kemampuan Bank Sampah Bersinar memberikan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Bank Sampah Bersinar sehingga masyarakat kurang mengetahui tentang pengelolaan sampah karena kemampuan ini mempengaruhi dalam melaksanakan kegiatan Pemberdayaan secara efektif yang akan menciptakan Pengembangan Potensi masyarakat berkembang , mengubah pola pikir masyarakat dalam pengelolaan sampah ,dan masih kurangnya pemeliharaan yang dilakukan terhadap sumberdaya seperti peralatan, pengolahan limbah , karena pemeliharaan pun mempengaruhi kemampuan Bank Sampah Bersinar dalam melaksanakan program Pemberdayaan secara optimal . Pengertian

pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses. Menurut Suharto dalam bukunya yang berjudul *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1. Pengembangan potensi
 2. Kemampuan
 3. Perlindungan
 4. Dukungan
 5. Pemeliharaan
- (Suharto, 2010: 67-68)

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Pengembangan Potensi, menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam pengelolaan sampah untuk meningkatkan dan memaksimalkan kemampuan, bakat, atau sumber daya yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Adapun pengembangan potensi tersebut dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a) Pengetahuan adalah hasil dari proses pengalaman masyarakat Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam pengelolaan sampah melalui Program di Bank Sampah Bersinar.
 - b) Motivasi adalah dorongan semangat kepada masyarakat Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan sampah melalui Program di Bank Sampah Bersinar.
 - c) Kultur adalah kebiasaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Baleendah dalam pengelolaan sampah.

2. Kemampuan adalah salah satu untuk memperkuat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki masyarakat Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam pengelolaan sampah. Faktor yang mempengaruhi kemampuan yaitu sebagai berikut:
 - a) Pendidikan adalah untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam pengelolaan sampah.
 - b) Pelatihan adalah upaya memberikan pengetahuan dalam pengelolaan sampah masyarakat Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.
3. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi dan terhindar terjadinya persaingan yang tidak seimbang pada Masyarakat Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Perlindungan terdiri dari :
 - a) Konsultasi adalah suatu aktivitas bertukar pikiran dalam rangka memecahkan masalah dalam pengelolaan sampah pada masyarakat Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam pengelolaan sampah.
4. Dukungan adalah kegiatan memberikan bimbingan dan penyediaan yang dilakukan kepada masyarakat Kecamatan Baleendah dalam pengelolaan sampah. Dukungan terdiri dari:
 - a) Keterampilan dasar adalah kemampuan yang dimiliki masyarakat Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam pengelolaan sampah.
 - b) Komunikasi adalah keterkaitan interaksi masyarakat Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam pengelolaan sampah.
5. Pemeliharaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan Masyarakat Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam pengelolaan sampah. Guna

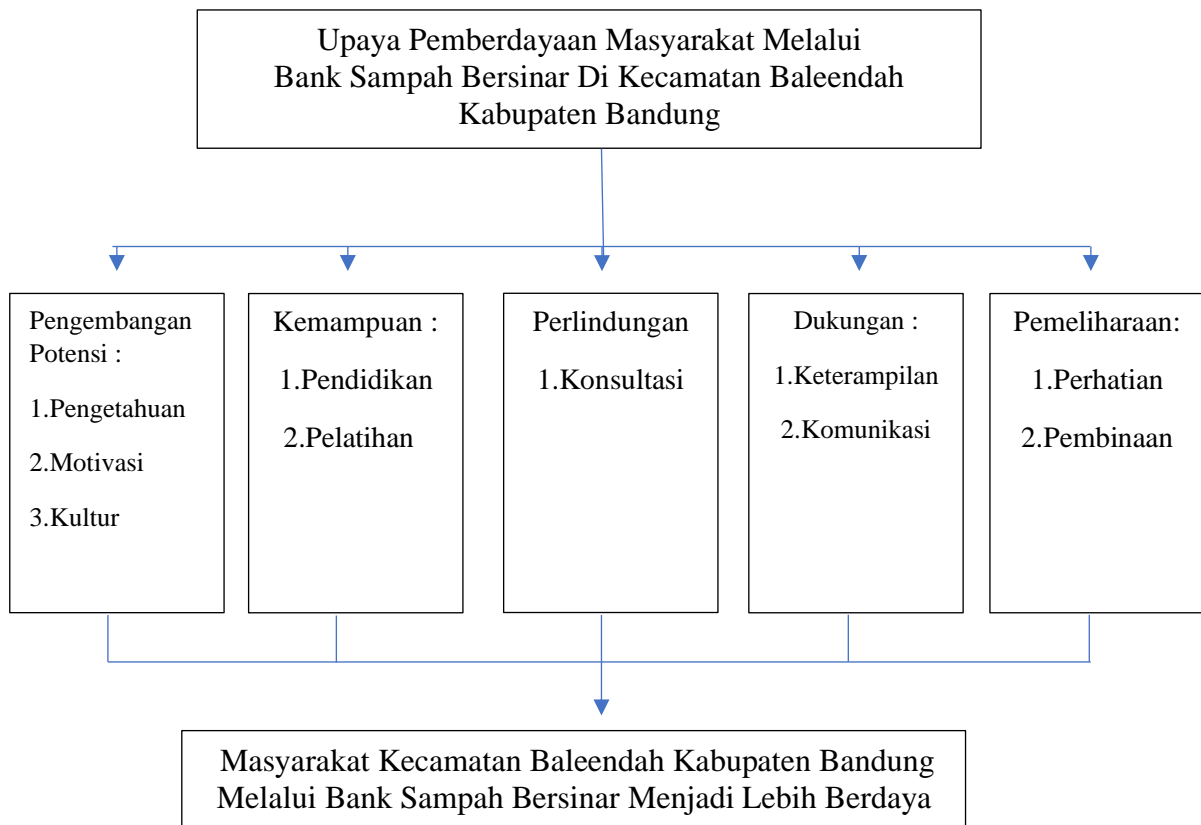
menciptakan kondisi yang kondusif, keselarasan dan keseimbangan masyarakat. Faktor pendukung pemeliharaan sebagai berikut:

- a) Perhatian adalah sikap masyarakat Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam kepekaan mengelola sampah.
- b) Pembinaan adalah upaya masyarakat Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam pengelolaan sampah.

Berdasarkan uraian diatas, agar mempermudah peneliti memahami pokok pada setiap teori yang digunakan maka model kerangka pemikiran yang didasarkan atas pola pikir peneliti seperti bagan dibawah ini:

Gambar 2.1

MODEL KERANGKA PEMIKIRAN



(Sumber: diolah oleh peneliti, 2023)

2.3 Proposisi

Berdasarkan penjelasan kerangka pemikiran diatas, maka proposisi pada penelitian ini adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah Bersinar di Kecamatan Baleendah dilihat dari indikator keberhasilan yaitu Pengembangan Potensi, Kemampuan, Perlindungan, Dukungan, dan Pemeliharaan.